



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW TASIKMALAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASWIN KOSOTALI**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN**
3. NHK : **252126**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **8.881.671.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 397 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 5.738.171.000
2. Bangunan Seluas 29 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 394.000.000
3. Bangunan Seluas 29 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
5. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, WARISAN Rp. 198.500.000
6. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 618.750.000
7. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 612.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **455.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI BALENO HATCHBACK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOBIL, MAZDA CX3 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **816.000.000****D. SURAT BERTAHAP** Rp. **886.946.890****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **2.565.777.337**



| | | |
|-----------------------------------|-----|----------------|
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 13.605.395.227 |
| III. HUTANG | Rp. | 678.925.134 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 12.926.470.093 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.